

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab ini akan membahas temuan-temuan dari penelitian sebelumnya serta konsep-konsep teori yang relevan dengan fokus penelitian:

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
1.	The Environmental Diplomacy of the Belt and Road Initiative: Going Green to Meet External Expectations	Paulo Afonso B. Duarte, Asya Gasparyan, Flávio Bastos da Silva, António Tavares	2025	Realisme dan Role Theory	Kualitatif	Melalui Green Silk Road (GSR), Belt and Road Initiative (BRI) diposisikan sebagai instrumen diplomasi hijau China. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi global, merespons kritik internasional, serta menegaskan peran China sebagai pemimpin global dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, keberhasilan diplomasi hijau tersebut masih menghadapi tantangan, terutama akibat adanya kesenjangan antara narasi kebijakan yang

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
						disampaikan dan praktik implementasi di lapangan.
1.	Greening China's Belt and Road Initiative: From Norm Localization to Norm Subsidiarity	Hongzhou Zhang, Mingjiang Li	2020	Norm Localization dan Policy Deliberation	Kualitatif	Upaya penghijauan BRI yang dilakukan oleh China bertujuan untuk merespons berbagai kritik internasional terhadap dampak lingkungan dari proyek-proyek BRI. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi diplomasi hijau China, yang sekaligus diarahkan untuk memproyeksi-kan citra negara tersebut sebagai pemimpin global dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui promosi energi terbarukan, penerapan standar lingkungan dalam kegiatan investasi, serta penguatan kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim, China berupaya menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang menjadi inti dari diplomasi hijau.

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
2.	Chinese Multilateralism and the Belt and Road Initiative: Green Diplomacy in the Making	Lachlan Carey, Sarah Ladislaw	2019	Liberalisme institusional	Kualitatif	BRI diposisikan sebagai instrumen utama multilateralisme hijau yang dijalankan oleh China, dengan tujuan menjadikannya sebagai sarana diplomasi hijau untuk merespons berbagai kritik internasional. Melalui pengembangan konsep Green Belt and Road Initiative serta penguatan kerja sama internasional dalam isu perubahan iklim, China berupaya membangun dan memproyeksikan citra dirinya sebagai pemimpin global dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
3.	China as a “Green Soft Power” and the Belt and Road Initiative	Hong Zhou	2025	Green Soft Power	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun China berupaya mempromosikan citra “ <i>green soft power</i> ” melalui BRI, terutama dengan kebijakan yang lebih proaktif, ada hambatan signifikan. Yang dimana pada <i>China-Pakistan</i>

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
						<i>Economic Corridor</i> (CPEC) menemukan bahwa proyek tersebut masih didominasi oleh proyek-proyek berbasis batu bara yang berdampak buruk pada lingkungan. Kurangnya transparansi dan prioritas yang rendah terhadap isu lingkungan dalam proyek ini membatasi efektivitas China dalam membangun "green soft power" melalui BRI
4.	Green Finance for Soft Power: An analysis of China's green policy signals and investments in the Belt and Road Initiative	Christoph Nedopil	2020	Soft Power	Mixed Methods	Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik investasi China dalam pembiayaan hijau BRI, di mana meskipun kebijakan ramah lingkungan terus dipromosikan, investasi aktual masih didominasi proyek berbasis bahan bakar fosil, sehingga melemahkan efektivitas pembangunan soft power hijau China.

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
5.	Environmental Diplomacy in the Age of Global Sustainability: Challenges, Actors, and the Future of International Environmental Governance	Tipusultan Alarsaheb Inamdar, Aarif Mohd Waza	2025	Green Diplomacy	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris penting dalam diplomasi iklim, implementasinya masih terkendala oleh masalah kepatuhan, keadilan, dan politik, sementara Protokol Montreal dinilai lebih berhasil karena tujuan dan mekanisme penerapannya yang jelas.
6.	Green Energy and New Forms of Diplomacy: Environmental Strategies in International Power Struggle	Gulsah Ozdemir	2025	Realisme, Liberalisme, Konstruktivisme	kualitatif	Hasil penelitian ini memadukan tiga perspektif teoretis utama, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, yang menunjukkan bahwa diplomasi hijau telah berkembang menjadi arena strategis tempat keamanan energi, tujuan iklim, dan kepentingan geopolitik saling berkelindan. Transformasi tersebut tidak semata-mata merepresentasikan agenda kebijakan lingkungan,

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
						melainkan juga mencerminkan proses restrukturisasi kepentingan nasional agar selaras dengan imperatif keberlanjutan global.
7.	China's Green Belt and Road Initiative: transnational environmental governance and causal pathways of orchestration	Environmental Politics	2022	Green Development	Mixed-Methods	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green BRI tidak hanya diposisikan sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola lingkungan transnasional yang dijalankan melalui empat jalur utama, yakni green infrastructure, green finance, green governance, dan green standards, dengan BRIGC berperan sebagai orchestrator, serta menegaskan pentingnya kolaborasi multi-level governance antara aktor internasional, nasional, dan lokal.
8.	Domestic Factors on China's Green Belt and Road Initiatives: Comparing	Rizka Bunga Shafira, Ardhitya Eduard Yeremia	2023	Multi-level Governance	Mixed-Methods	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Green BRI di Indonesia masih dipengaruhi oleh

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
	Indonesia and Thailand					lemahnya regulasi lingkungan, terbatasnya keterlibatan aktor lokal, serta adanya tarik-ulur antara kepentingan percepatan pembangunan dan agenda keberlanjutan. Sebaliknya, Thailand dinilai lebih siap secara kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Green BRI sangat bergantung pada faktor domestik serta efektivitas penerapan pendekatan multi-level governance.
9.	Climate Diplomacy: International and National Responses	Emanuela Locci, Hamza Jammoul	2023	Climate Diplomacy	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim merupakan praktik yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri, negosiasi internasional, dan implementasi domestik, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada sinkronisasi multi-level governance dari komitmen internasional hingga pelaksanaan di tingkat lokal,

No	Judul	Penulis	Tahun	Teori	Metode	Hasil
						sehingga kerangka ini relevan untuk memahami dinamika kerja sama iklim Indonesia–China dalam kerangka BRI.

Artikel pertama berjudul *“The Environmental Diplomacy of the Belt and Road Initiative: Going Green to Meet External Expectations”* yang ditulis oleh Paulo Afonso B. Duarte, Asya Gasparyan, Flávio Bastos da Silva, dan António Tavares mengkaji praktik diplomasi lingkungan China melalui konsep *Green Silk Road* (GSR) sebagai bagian integral dari *Belt and Road Initiative* (BRI). Penelitian ini berfokus pada upaya China dalam mengintegrasikan agenda lingkungan ke dalam kerangka kerja sama internasionalnya sebagai respons terhadap tuntutan dan ekspektasi global terhadap perilaku negara dengan kekuatan besar yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.

Artikel tersebut menganalisis bagaimana strategi “penghijauan” BRI berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian peran (*role adjustment mechanism*) yang bertujuan untuk menyelaraskan citra dan identitas internasional China dengan norma global mengenai pembangunan berkelanjutan. Melalui pengembangan proyek-proyek yang berorientasi pada energi terbarukan dan infrastruktur hijau, GSR diposisikan sebagai instrumen diplomasi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga normatif dan simbolik dalam konteks hubungan internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Green Silk Road* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan citra global China, terutama melalui proyek energi terbarukan yang dinilai memiliki dampak paling signifikan dalam membentuk persepsi internasional. Temuan ini mencerminkan adanya pergeseran strategis dalam kebijakan luar negeri China, dari pendekatan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur keras,

menuju pendekatan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pergeseran ini juga dimaknai sebagai upaya China untuk merespons kritik internasional sekaligus meningkatkan legitimasi dan penerimaan global terhadap inisiatif BRI.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa *melalui Green Silk Road, Belt and Road Initiative* bertransformasi menjadi instrumen diplomasi hijau China yang bertujuan memperkuat legitimasi internasional, menanggapi tekanan normatif global, serta menegaskan peran China sebagai aktor utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan global. Meskipun demikian, artikel ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara narasi kebijakan dan implementasi di tingkat lapangan. Perbedaan antara retorika hijau dan praktik aktual proyek BRI di sejumlah negara mitra menjadi tantangan utama yang berpotensi menghambat efektivitas dan kredibilitas diplomasi lingkungan China.

Artikel kedua berjudul ***“Greening China’s Belt and Road Initiative: From Norm Localization to Norm Subsidiarity”*** yang ditulis oleh Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li mengkaji dinamika politik yang melatarbelakangi kebijakan China dalam mendorong agenda penghijauan Belt and Road Initiative (BRI) sejak tahun 2015.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor pendorong perubahan kebijakan tersebut dengan menggunakan kerangka teori lokalisasi norma, subsidiaritas norma, serta musyawarah kebijakan (policy deliberation). Penulis berargumen bahwa transformasi BRI menuju orientasi yang lebih ramah lingkungan bermula dari proses lokalisasi norma, yakni ketika norma-norma lingkungan global diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam ruang kebijakan domestik yang dibentuk oleh ambisi elite politik China untuk menjadikan BRI sebagai model alternatif tata kelola global. Upaya penghijauan BRI ini dipahami sebagai respons strategis terhadap meningkatnya kritik internasional, sekaligus sebagai bagian integral dari diplomasi hijau China. Melalui promosi energi terbarukan, penerapan standar lingkungan dalam investasi luar negeri, serta penguatan kerja sama multilateral terkait isu

perubahan iklim, China berupaya memproyeksikan dirinya sebagai aktor utama dan pemimpin global dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Artikel ketiga yang berjudul “*Chinese Multilateralism and the Promise of a Green Belt and Road*” karya Lachlan Carey dan Sarah Ladislaw mengkaji strategi China dalam memanfaatkan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai wahana multilateralisme untuk membangun dan mengonsolidasikan citra sebagai pemimpin global dalam pembangunan hijau. Kajian ini menempatkan BRI tidak semata-mata sebagai agenda pembangunan infrastruktur dan ekonomi, melainkan sebagai instrumen soft power yang dirancang untuk memperkuat kepemimpinan normatif China dalam isu lingkungan di tingkat internasional. Melalui pendekatan multilateral, China berupaya mengintegrasikan narasi keberlanjutan dan pembangunan hijau ke dalam kerangka BRI guna meningkatkan legitimasi global serta memperluas pengaruh politiknya.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa upaya tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural yang signifikan. Tantangan utama mencakup rendahnya tingkat transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI, lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan standar lingkungan, serta tingginya ketergantungan pada regulasi dan kapasitas institusional negara penerima dalam menetapkan dan menerapkan standar lingkungan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas BRI sebagai instrumen pembangunan hijau sangat bervariasi antar negara mitra dan bergantung pada komitmen serta kemampuan domestik masing-masing pihak. Artikel ini juga menyoroti risiko bahwa narasi pembangunan hijau yang diusung China berpotensi dipersepsikan sebagai retorika semata apabila tidak diikuti oleh konsistensi implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif kritis mengenai peluang dan keterbatasan multilateralisme BRI, serta menegaskan bahwa keberhasilan China dalam memproyeksikan diri sebagai pelopor pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi tantangan implementatif tersebut.

Artikel keempat yang berjudul “*China as a ‘Green Soft Power’ and the Belt and Road Initiative: Evidence from Pakistan*” karya Agnieszka Nitza-Makowska

mengkaji upaya China dalam membangun citra sebagai pemimpin lingkungan global melalui strategi green soft power yang diproyeksikan melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Penelitian ini secara khusus menggunakan Pakistan sebagai studi kasus untuk menelaah bagaimana narasi pembangunan hijau China diterjemahkan ke dalam praktik kerja sama infrastruktur di negara mitra. Dalam konteks tersebut, BRI tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana diplomasi yang bertujuan membentuk persepsi positif terhadap komitmen lingkungan China di tingkat internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun China secara aktif mempromosikan retorika pembangunan hijau dan memperkenalkan proyek-proyek BRI dengan label ramah lingkungan, implementasi di Pakistan masih didominasi oleh proyek energi berbasis fosil, khususnya batu bara. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara klaim normatif mengenai pembangunan berkelanjutan dengan realitas kebijakan dan praktik di lapangan. Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara wacana hijau yang dikonstruksikan China dan dampak lingkungan nyata dari proyek-proyek BRI.

Lebih lanjut, Nitza-Makowska menekankan bahwa kontradiksi antara narasi dan implementasi berpotensi melemahkan kredibilitas China dalam memanfaatkan BRI sebagai instrumen green soft power. Tanpa konsistensi dalam penerapan standar lingkungan yang ketat dan pergeseran nyata menuju energi bersih, strategi diplomasi hijau yang diusung melalui BRI berisiko dipersepsikan sebagai simbolik dan retorik semata. Dengan demikian, artikel ini memberikan kritik penting terhadap efektivitas BRI sebagai alat diplomasi lingkungan dan menyoroti tantangan yang dihadapi China dalam mengukuhkan perannya sebagai aktor utama dan pemimpin global dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Artikel kelima yang berjudul “*Green Finance for Soft Power: An Analysis of China’s Green Policy Signals and Investments in the Belt and Road Initiative*” karya Christoph Nedopil (2020) mengkaji pemanfaatan pembiayaan hijau sebagai instrumen soft power dalam strategi luar negeri China melalui *Belt and Road*

Initiative (BRI). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan publik dan komitmen normatif pemerintah dapat dipahami sebagai policy signals, sementara alokasi investasi aktual mencerminkan policy actions yang menunjukkan tingkat keseriusan implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, artikel tersebut berupaya menilai sejauh mana konsistensi antara retorika kebijakan hijau China dan praktik investasi yang dijalankan dalam kerangka BRI.

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara sinyal kebijakan dan tindakan nyata. Di satu sisi, pemerintah China secara aktif mengeluarkan berbagai kebijakan, pedoman, dan inisiatif yang mendorong investasi ramah lingkungan serta menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dalam proyek-proyek BRI. Namun, di sisi lain, pola investasi aktual memperlihatkan bahwa pembiayaan China masih banyak diarahkan pada proyek-proyek non-hijau, khususnya di sektor energi berbasis bahan bakar fosil. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju pembiayaan hijau dalam BRI belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik investasi.

Lebih lanjut, Nedopil menegaskan bahwa inkonsistensi antara kebijakan dan investasi tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas upaya China dalam membangun soft power melalui pembiayaan hijau. Alih-alih memperkuat citra sebagai pemimpin global dalam pembangunan berkelanjutan, ketergantungan yang berkelanjutan pada pembiayaan proyek non-hijau justru berpotensi melemahkan kredibilitas dan merusak reputasi internasional China. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami keterbatasan strategi diplomasi hijau China melalui BRI, sekaligus menyoroti tantangan struktural dalam menyelaraskan komitmen normatif dengan implementasi kebijakan yang konsisten.

Artikel keenam berjudul “*Environmental Diplomacy in the Age of Global Sustainability: Challenges, Actors, and the Future of International Environmental Governance*” karya Tipusultan Alarsaheb Inamdar dan Aarif Mohd Waza mengkaji dinamika diplomasi lingkungan dalam konteks meningkatnya urgensi agenda keberlanjutan global. Penelitian ini menempatkan diplomasi lingkungan sebagai instrumen strategis dalam tata kelola lingkungan internasional

yang berfungsi menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan kolektif global dalam menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada peran berbagai perjanjian internasional, seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, sebagai kerangka normatif yang bertujuan mendorong komitmen negara-negara terhadap pengurangan emisi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian-perjanjian tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, antara lain lemahnya tingkat kepatuhan negara peserta, ketimpangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang, serta keterbatasan kemauan politik dalam mengimplementasikan komitmen yang telah disepakati.

Lebih lanjut, penulis menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak mengurangi signifikansi diplomasi lingkungan sebagai sarana utama dalam mencari solusi kolektif terhadap permasalahan lingkungan global. Keberhasilan diplomasi lingkungan di masa depan sangat bergantung pada penguatan kerja sama internasional, peningkatan komitmen politik, serta penyediaan dukungan finansial dan transfer teknologi yang memadai bagi negara-negara berkembang. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam tata kelola lingkungan internasional guna mewujudkan agenda keberlanjutan global secara lebih efektif.

Artikel ketujuh berjudul ***“Green Energy and New Forms of Diplomacy: Environmental Strategies in International Power Struggle”*** karya Gulsah Ozdemir mengkaji kemunculan diplomasi energi hijau sebagai instrumen baru dalam kebijakan luar negeri negara-negara di tengah transisi global menuju energi ramah lingkungan. Penelitian ini menempatkan diplomasi hijau sebagai respons strategis terhadap perubahan struktur kekuasaan internasional, di mana isu keamanan energi, komitmen iklim, dan kepentingan geopolitik semakin saling terkait.

Dalam kerangka analisisnya, artikel ini mengintegrasikan tiga perspektif teoretis utama, yakni realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, untuk

menjelaskan bagaimana diplomasi energi hijau beroperasi dalam dinamika hubungan internasional. Dari sudut pandang realisme, transisi energi dipahami sebagai arena baru persaingan kekuasaan dan pengaruh antarnegara. Sementara itu, pendekatan liberalisme menekankan pentingnya kerja sama internasional, institusi global, dan rezim lingkungan dalam mengelola tantangan perubahan iklim. Adapun konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan peran norma, identitas, dan wacana keberlanjutan dalam membentuk kepentingan dan perilaku negara.

Ozdemir berargumen bahwa diplomasi hijau merepresentasikan transformasi mendasar dari praktik diplomasi tradisional yang selama ini berfokus pada eksploitasi dan distribusi bahan bakar fosil menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Diplomasi jenis ini tidak hanya mengintegrasikan strategi lingkungan ke dalam kebijakan luar negeri, tetapi juga mendorong pendekatan kolaboratif dalam menghadapi persoalan lingkungan sebagai masalah bersama global. Dengan demikian, transisi menuju energi hijau tidak sekadar mengubah arah kebijakan lingkungan, melainkan turut membentuk ulang kepentingan nasional agar selaras dengan tuntutan keberlanjutan global dan dinamika kekuasaan internasional yang terus berkembang.

Artikel kedelapan berjudul ***“China’s Green Belt and Road Initiative: Transnational Environmental Governance and Causal Pathways of Orchestration”*** mengkaji *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai instrumen tata kelola lingkungan transnasional yang melampaui perannya sebagai proyek kerja sama ekonomi. Penelitian ini menempatkan BRI dalam kerangka *transnational environmental governance*, di mana China berupaya membentuk dan memengaruhi praktik pembangunan berkelanjutan lintas negara melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai aktor di berbagai level.

Fokus utama artikel ini adalah konsep orkestrasi, yang dijalankan melalui empat jalur utama, yakni green infrastructure, green finance, green governance, dan green standards. Keempat jalur tersebut dipahami sebagai perangkat strategis untuk mendorong integrasi prinsip-prinsip lingkungan ke dalam perencanaan,

pembiayaan, dan pelaksanaan proyek-proyek BRI. Dalam konteks ini, BRI International Green Development Coalition (BRIGC) diposisikan sebagai aktor kunci yang berfungsi sebagai orchestrator, menghubungkan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat sipil guna menyelaraskan kepentingan dan memperkuat implementasi agenda hijau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui mekanisme orkestrasi tersebut, BRI memiliki potensi untuk berkembang menjadi model alternatif tata kelola lingkungan global yang bersifat kolaboratif dan multi-level. Namun demikian, efektivitas Green BRI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait harmonisasi standar lingkungan antarnegara serta kesenjangan kapasitas institusional di negara-negara mitra. Oleh karena itu, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip transparansi, penguatan kerja sama lintas aktor, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana China membingkai dan mempraktikkan kepemimpinan lingkungan melalui pendekatan tata kelola transnasional dalam kerangka BRI.

Artikel kesembilan berjudul “***Domestic Factors on China’s Green Belt and Road Initiatives: Comparing Indonesia and Thailand***” karya Rizka Bunga Shafira dan Ardhitya Eduard Yeremia (2023) mengkaji pengaruh faktor-faktor domestik terhadap implementasi agenda *Green Development* dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Thailand, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan proyek-proyek hijau BRI tidak semata-mata ditentukan oleh komitmen dan kebijakan China sebagai penggagas inisiatif, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik negara mitra.

Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yakni regulasi lingkungan, kapasitas kelembagaan, dan tingkat keterlibatan aktor lokal dalam proses perencanaan serta pelaksanaan proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya kerangka regulasi lingkungan, keterbatasan kapasitas institusional, rendahnya

koordinasi antar-lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan hijau dalam proyek-proyek BRI di Indonesia.

Sebaliknya, Thailand dinilai memiliki kesiapan yang relatif lebih baik, ditunjukkan oleh keberadaan regulasi lingkungan yang lebih mapan, institusi yang lebih kuat, serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Perbandingan ini menegaskan bahwa keselarasan antara kebijakan nasional dengan standar internasional, serta keterlibatan aktif aktor domestik, merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi Green BRI. Dengan demikian, artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan multi-level governance yang mampu mengintegrasikan komitmen global, kebijakan nasional, dan praktik lokal, sekaligus memperingatkan bahwa tanpa dukungan domestik yang memadai, agenda hijau dalam BRI berpotensi berhenti pada tataran normatif dan retorika semata.

Artikel kesepuluh berupa buku berjudul “*Climate Diplomacy: International and National Responses karya Emanuela Locci dan Hamza Jammoul (2023)*” mengkaji diplomasi iklim sebagai praktik yang bersifat multidimensional, yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri, proses negosiasi internasional, serta implementasi kebijakan di tingkat domestik. Buku ini memandang diplomasi iklim tidak sekadar sebagai arena perundingan antarnegara, melainkan sebagai rangkaian proses berkelanjutan yang menghubungkan komitmen global dengan tindakan nyata di tingkat nasional dan lokal.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada dinamika interaksi lintas level global, nasional, dan lokal dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Para penulis menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama iklim internasional tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan global, seperti yang dihasilkan melalui UNFCCC dan forum *Conference of the Parties (COP)*, tetapi sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk menginternalisasi komitmen tersebut ke dalam kerangka kebijakan nasional yang koheren dan implementatif. Tanpa proses

internalisasi yang efektif, komitmen internasional berisiko berhenti pada tataran normatif.

Lebih lanjut, buku ini menunjukkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan luar negeri, regulasi domestik, dan implementasi di tingkat lokal merupakan prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola iklim yang efektif. Namun demikian, penulis juga menyoroti berbagai tantangan yang menghambat proses tersebut, termasuk perbedaan kepentingan politik dan ekonomi antarnegara, keterbatasan kapasitas institusional di tingkat domestik, serta kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diplomasi iklim dipahami sebagai praktik multi-level governance yang menuntut konsistensi, koordinasi, dan komitmen lintas level pemerintahan.

Secara konseptual, temuan dalam buku ini memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisis kerja sama Indonesia China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam konteks isu iklim. Pendekatan diplomasi iklim yang menekankan keterpaduan antara agenda global, kebijakan nasional, dan kebutuhan lokal dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kerja sama bilateral tersebut mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan komitmen iklim Indonesia.